

# Determinans of Regional Apparatus Organization (OPD) Budget Absorption within the Sidoarjo Regency Government [Determinan Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo]

Ika Susilowati<sup>1)</sup>, Sarwenda Biduri <sup>\*.2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [sarwendabiduri@umsida.ac.id](mailto:sarwendabiduri@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to examine the influence of budget planning, quality of human resources, organizational commitment, administrative records, government rules/regulations and budget changes on budget absorption in the Sidoarjo Regency Government. The population in this research is regional apparatus organizations in Sidoarjo Regency, totaling 31 OPDs. The method used was purpose sampling, with a total sample of 62 respondents. The data analysis method used in this research is SPSS version 26. The results of this research show that the quality of human resources, organizational commitment, administrative records, and budget changes have a significant effect on budget absorption, while government planning and regulations/regulations have no effect on budget absorption. in Sidoarjo Regency.*

**Keywords** - Budget Absorption; Budget Planning; Quality of Human Resources; Organizational Commitment; Administrative Records; government rules/regulations and budget changes

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi, peraturan/ketentuan pemerintah dan perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 31 OPD. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 62 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi, dan perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan perencanaan pemerintah dan peraturan/peraturan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. di Kabupaten Sidoarjo*

**Kata Kunci** – perencanaan anggaran; kualitas sumber daya manusia; komitmen organisasi; pencatatan administrasi; peraturan/regulasi pemerintah; perubahan anggaran; penyerapan anggaran

## I. PENDAHULUAN

Belum maksimalnya penyerapan serapan anggaran belanja di Pemerintahan menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan, utamanya di akhir tahun anggaran. Fenomena ini, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah baik di daerah provinsi ataupun kabupaten/kota. penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan mampu menjadi pendobrak perekonomian di daerah, akan tetapi ternyata terdapat fenomena penyerapan kurang maksimal yang terjadi berulang yang dari tahun ke tahun [1].

Serapan anggaran adalah salah satu parameter capaian evaluasi kinerja terkait aspek implementasi. Evaluasi kinerja terkait aspek implementasi dilaksanakan untuk mendapatkan catatan kinerja tentang penyelenggaraan kegiatan serta capaian keluaran [2]. Biasanya, tiap akhir tahun terjadi kenaikan atau peningkatan yang cukup signifikan terhadap pencairan dana/serapan anggaran di pemerintahan. Tren kenaikan ini adalah tribulan terakhir di tahun anggaran sangat melonjak sehingga kesannya dipaksakan dalam menyelesaikan target kegiatan. Bisa dikatakan, penyerapan anggaran cenderung rendah di tribulan pertama dan melonjak tajam di tribulan terakhir untuk menghindari Sisa Lebih Anggaran (SILPA). Hal ini tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam sebuah DIPA yang telah disusun oleh PA / KPA dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Penyerapan anggaran Pemda tidak cocok dengan rencana semula dikarenakan alur perencanaan belum sesuai kenyataan atau terdapat efisiensi pada penerapan APBD [3].

Fenomena kurang maksimalnya penyerapan di tribulan pertama dan meningkat di tribulan akhir ini juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2021 Realisasi penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo masih

dikatakan rendah rendah. Sampai akhir November masih sekitar 62% [4]. Pada tahun 2022 Sidoarjo baru dapat merealisasikan adalah sebesar 55,58%, dengan rincian, terealisasi Rp. 2.500.000.000.000,- dari anggaran Rp. 4.500.000.000.000,-. Sedangkan APBD baru terserap 49,40%. Setara Rp. 2.600.000.000.000,- dari total anggaran Rp. 5.400.000.000.000,- [5]. Sedangkan pada tahun 2023 bulan Mei realisasi pendapatan APBD 2023 baru mencapai 22 persen. yakni sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- dari target Rp. 4.700.000.000.000,-. Sedangkan serapan anggaran belanja masih mencapai 16%. Baru terserap Rp. 871.000.000.000,- dari anggaran Rp. 5.200.000.000.000,- [6].

Tahun	Anggaran 1 tahun	Realisasi Anggaran		
		Tribulan	Realisasi Anggaran	persentase
2022	5.291.622.947.330,00	1	676.092.728.748,28	12,78
		2	1.718.759.298.835,26	32,48
		3	2.852.466.118.818,26	53,91
		4	4.849.911.746.143,62	91,65
2023	5.367.503.579.233,00	1	747.330.700.313,40	13,92
		2	1.786.798.308.032,25	33,29
		3	2.962.105.613.443,00	55,19
		4	4.714.370.857.717,00	87,83

Tabel 1. Realisasi anggaran Pemkab. Sidoarjo tahun 2022 – 2023 (sumber BPKAD Kab. Sidoarjo, siksda sidoarjokab.go.id)

Kurangnya penyerapan anggaran di Kabupaten Sidoarjo kerap kali di anggap sebagai buruknya kinerja birokrasi. Namun dalam sistem penyerapan anggaran berbasis kinerja tersebut tidak dapat dijadikan sebagai parameter karena sejatinya kinerja birokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran, akan tetapi keadaan perekonomian saat ini lah yang masih bergantung pada konsumsi pemerintah yang kemudian belanja pemerintah turut menjadi salah satu penggerak berputarnya roda perekonomian. Penyerapan anggaran memang penting untuk mendongkrak terciptanya *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam hal ini pada Kabupaten Sidoarjo. Kegagalan penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena dana yang didistribusikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah meskipun dana belanja tersebut dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya, namun dana tersebut berpotensi akan berkurang atau kehilangan manfaat belanja yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan konsep *value of money*.

*Teori Stakeholder* digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. *Stakeholder* yaitu pihak-pihak dari dalam maupun dari luar, seperti : masyarakat sekitar lingkungan, pemerintah, pemegang saham perusahaan, internasional, lembaga diluar perusahaan, dan lainnya yang mempunyai sifat untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan [7]. Pemerintah diharap mampu mengupayakan pembangunan secara maksimal karena pemerintah dianggap *stakeholders* yang mempunyai peran pokok dalam usaha memajukan sebuah daerah. Kesuksesan suatu daerah bisa dilihat dari peran pemerintah sebagai puncak kekuasaan tertinggi yang dapat mengolah anggaran untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Kesejahteraan rakyat ini maksudnya ialah bagaimana dana yang ada dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum yang memadai dan layak. Segala bentuk pelayanan, strategi dan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah menjadi tanggungan kolektif OPD sebagai aktor pemda. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien serta tidak mengurangi realisasi penyerapan. Usulan anggaran yang diajukan OPD menjadi dasar penyusunan APBD dan setelah disahkan akan menjadi standar baku penilaian kinerja anggaran OPD masing-masing. Anggaran adalah alat untuk menyalurkan sumber daya dan meramalkan pendapatan dan pengeluaran di masa depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui tindakan berupa layanan yang diberikan oleh OPD [8]. Penyimpangan anggaran ini merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah [9], dan erat kaitannya dengan kebingungan anggaran dalam penganggaran partisipatif [10]. Fenomena kinerja anggaran menjadi bahan perdebatan di kalangan politisi, birokrat, pengambil kebijakan, dan khususnya pemerintah pusat yang memberikan pedoman kepada pemerintah daerah [11]. Di beberapa negara, kinerja anggaran bahkan dapat mempengaruhi pemilihan petahana untuk kembali berkuasa melalui pemilihan umum pada periode berikutnya[12].

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah, namun dengan temuan yang beragam dan terkait dengan konteks yang berbeda. [13] [14] menemukan bahwa perencanaan anggaran, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan pencatatan administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. [15] menemukan bahwa pelaksanaan anggaran, regulasi, perencanaan anggaran, dan SDM tidak memberikan berpengaruh pada penyerapan anggaran. Selain itu, ditemukan bahwa pelaksanaan anggaran, regulasi,

SDM, perencanaan anggaran, dan PBJ mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada penyerapan anggaran [16] membuktikan bahwa regulasi keuangan daerah memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, politik anggaran tidak memberikan pengaruh pada serapan anggaran, proses PBJ tidak memberikan pengaruh pada serapan anggaran, komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap serapan anggaran, ketidakpastian lingkungan tidak memberikan pengaruh terhadap serapan anggaran dan SILPA tidak memberikan pengaruh terhadap serapan anggaran. [17] menunjukkan hasil bahwa pengadaan barang dan jasa serta kualitas SDM berdampak baik pada penyerapan anggaran belanja. Sedangkan komitmen organisasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak berdampak pada penyerapan anggaran belanja. [18] Menemukan hasil bahwa regulasi/peraturan keuangan daerah, SPIP, SILPA dan perubahan anggaran berdampak baik dan signifikan pada penyerapan anggaran. Menurut hasil beberapa penelitian yang sudah ada, terdapat beberapa perbedaan hasil antara penelitian satu terhadap penelitian yang lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengujinya lagi, penelitian ini adalah replikasi dari penelitian [13].

Perbedaannya adalah disini penulis menambahkan variabel yang bisa memberikan pengaruh pada penyerapan anggaran yakni regulasi/peraturan pemerintah, perubahan anggaran dan tempat penelitian. Alasan dipilihnya Kabupaten Sidoarjo karena di Sidoarjo juga terjadi masalah terhadap serapan anggaran pada tahun 2022 dan 2023. Atas dasar itulah sehingga tujuan penelitian ini ialah untuk menguji kembali apakah dengan teori yang sama apabila digunakan pada waktu dan lokasi yang tidak sama akan memberikan hasil yang sama atautkah berbeda.

## II. METODE

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk memperoleh data dengan suatu tujuan atau penggunaan tertentu [19]. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan wawancara, observasi atau angket tentang keadaan sekarang ini dan tentang subjek yang sedang diteliti [20]. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan software SPSS versi 26., metode pengumpulan data menggunakan survey kepada responden berupa kuisioner tertutup melalui google form dengan skala likert, skala pengukuran 1 - 5 = (1) STS = Sangat Tidak Setuju, (2) TS = Tidak Setuju, (3) AS = Agak Setuju, (4) S = Setuju, (5) SS = Sangat Setuju.

### B. Populasi

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, populasinya adalah 32 OPD terdiri dari Badan dan Dinas di lingkungan pemkab. Sidoarjo

### C. Sampel

Sampel penelitian ini berjumlah 62 orang yang terdiri dari PPKom/PPTK, bendahara/staf administrasi keuangan dari masing-masing OPD tersebut. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan sampel yaitu cara menentukan sampel menggunakan kriteria dan syarat tertentu [21]. Kriteria tersebut adalah :

1. Responden adalah ASN OPD Kabupaten Sidoarjo dengan masa kerja lebih dari setahun
2. Responden adalah Pejabat eselon III, eselon IV, Fungsional Perencanaan atau Keuangan di Badan atau Dinas di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menjabat sebagai PPKom atau PPTK
3. Responden adalah ASN di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai kewenangan atau Jabatan di bagian keuangan dan administrasi (Bendahara atau staf administrasi keuangan)

Tabel 2. Indikator dan Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Perencanaan Anggaran (X1)	a) Komprehensif	[13][17]
	b) Terperinci	
	c) Prioritas	
	d) Keterbukaan	
Kualitas SDM (X2)	a) Pengetahuan	[13][17]
	b) Ketrampilan	
	c) Sikap	
Komitmen Organisasi (X3)	a) <i>Affectyve Commitmen</i>	[13]
	b) <i>Continuance Commitmen</i>	

	c) <i>Normative Commitmen</i>	
Pencatatan Administrasi (X4)	a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran b) Proses Penyusunan Dokumen c) Pagu Anggaran	[13]
Peraturan/Regulasi Keuangan Daerah (X5)	a) Perubahan Regulasi b) Mempelajari Regulasi c) Kepatuhan terhadap regulasi	[18]
Perubahan Anggaran (x6)	a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran-pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja	[18]
	b) Selisih antara anggaran belanja setelah perubahan dengan anggaran belanja dalam APBD murni	[22]
Serapan Anggaran (Y)	Tingkat Penyerapan Anggaran	[13] [23]

#### d. Teknik Analisis Data

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas dipakai untuk mengetahui kelaikan instrument-instrument dalam daftar - daftar pernyataan untuk mengartikan suatu variabel. Kriteria uji validitas memakai *product moment*, yaitu:

- Jika  $r$  hitung lebih besar  $r$  tabel maka instrument berarti valid.
- Jika  $r$  hitung lebih kecil  $r$  tabel maka instrument berarti tidak layak/valid

##### 2. Uji Reabilitas

Reabilitas menyiratkan pada suatu makna apakah suatu instrument bisa mengukur hal yang diukur secara berkesinambungan sepanjang waktu [24]. Uji reabilitas instrument dilaksanakan dengan formula *Alfa Cronbach* karena data yang digunakan berupa data interval. Kriteria koefisien reliabilitas menurut [25] adalah

Nilai	Ket
Lebih kecil 0,20	sangat rendah
0,21 s.d 0,40	rendah
0,41 s.d 0,70	sedang
0,71 s.d 0,90	tinggi
0,91 s.d 1,00	sangat tinggi

#### Uji Hipotesis

##### 1. Analisis regresi linear berganda

Penelitian ini memakai metode analisis regresi linear berganda dengan maksud memperkirakan hubungan antara **dua atau lebih variabel bebas** dan **satu variabel terikat** demi memberi gambaran arah relasi antara variabel independent dengan variabel dependen. Tahapan selanjutnya setelah penjabaran variabel adalah melakukan identifikasi persamaan pengujian. Persamaan yang terbentuk berdasarkan identifikasi variabel yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + \beta_6.X_6 + e$$

Dimana :

- $Y$  = Serapan Anggaran  
 $\alpha$  = konstanta  
 $\beta$  = koefisien regresi  
 $X_1$  = Perencanaan anggaran  
 $X_2$  = Kualitas SDM  
 $X_3$  = Komitmen organisasi  
 $X_4$  = Pencatatan Administrasi

X5 = Peraturan/Regulasi keuangan daerah  
 X6 = Perubahan anggaran  
 e = error

## 2. Uji Hipotesis Parsial ((Uji t)

Uji t-statistik pada hakikatnya menunjukkan sejauh mana suatu variabel penjelas atau independen berkontribusi dalam menjelaskan variasi variabel dependen [26]. Uji t menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempergunakan tingkat toleransi 5%, dengan metrik :

- apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan  $p\text{-value} < 0.05$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti secara parsial salah satu variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  dan  $p\text{-value} > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti secara parsial salah satu variabel bebas independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu koefisien yang menyiratkan persentase dampak seluruh variabel independen pada variabel dependen dalam menerangkan variabel dependen [27]

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai di 31 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah responden sebanyak 62 responden. Adapun karakteristik responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Karakteristik Responden**

Kriteria	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pegawai ASN Kabupaten Sidoarjo		
Bekerja lebih dari 1 tahun	62	100
ASN yang menjabat sebagai PPKom/PPTK	29	46,8
ASN yang menjabat sebagai bendahara/staf administrasi keuangan	33	53,2

Sumber : Data olahan SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa responden pada penelitian ini adalah pegawai ASN di OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 62 orang yang memiliki jabatan/kewenangan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu PPKom/PPTK sebanyak 46,8% atau sebanyak 29 orang, sedangkan bendahara/staf administrasi keuangan 53,2% atau sebanyak 33 orang.

### Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif jawaban responden dirancang agar peneliti dapat memahami kecenderungan tanggapan responden terhadap variable yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil analisis deskriptif untuk masing-masing variable :

**Tabel 2**  
**Hasil Deskriptif Statistic**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	62	25	45	38,68	5,098
X2	62	25	45	38,40	5,367
X3	62	27	45	38,40	4,967
X4	62	19	35	29,69	4,619

X5	62	21	35	30,06	4,254
X6	62	13	25	21,16	2,723
Y	62	20	35	30,42	3,414
Valid N (listwise)	62				

Sumber : Data olahan SPSS versi 26, 2023

### Uji Validitas

**Tabel 3.**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas**

Variabel	Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	1	0.758	0.3198	valid
	2	0.768	0.3198	valid
	3	0.861	0.3198	valid
	4	0.824	0.3198	valid
	5	0.805	0.3198	valid
	6	0.648	0.3198	valid
	7	0.807	0.3198	valid
	8	0.863	0.3198	valid
	9	0.850	0.3198	valid
Kualitas SDM (X2)	1	0.781	0.3198	valid
	2	0.790	0.3198	valid
	3	0.865	0.3198	valid
	4	0.806	0.3198	valid
	5	0.706	0.3198	valid
	6	0.675	0.3198	valid
	7	0.828	0.3198	valid
	8	0.874	0.3198	valid
	9	0.864	0.3198	valid
Komitmen Organisasi (X3)	1	0.733	0.3198	valid
	2	0.722	0.3198	valid
	3	0.793	0.3198	valid
	4	0.832	0.3198	valid
	5	0.745	0.3198	valid
	6	0.682	0.3198	valid
	7	0.784	0.3198	valid
	8	0.814	0.3198	valid
	9	0.714	0.3198	valid
Pencatatan Administrasi (X4)	1	0.787	0.3198	valid
	2	0.762	0.3198	valid
	3	0.763	0.3198	valid
	4	0.784	0.3198	valid
	5	0.750	0.3198	valid
	6	0.826	0.3198	valid
	7	0.835	0.3198	valid
Peraturan/Regulasi Keuangan Daerah (X5)	1	0.806	0.3198	valid
	2	0.769	0.3198	valid
	3	0.831	0.3198	valid
	4	0.746	0.3198	valid
	5	0.803	0.3198	valid
	6	0.873	0.3198	valid

	7	0.781	0.3198	valid
Perubahan Anggaran (X6)	1	0.776	0.3198	valid
	2	0.840	0.3198	valid
	3	0.707	0.3198	valid
	4	0.586	0.3198	valid
	5	0.613	0.3198	valid
Serapan Anggaran (Y)	1	0.797	0.3198	valid
	2	0.744	0.3198	valid
	3	0.760	0.3198	valid
	4	0.678	0.3198	valid
	5	0.754	0.3198	valid
	6	0.722	0.3198	valid
	7	0.754	0.3198	valid

Sumber : Data olahan SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa soal pertanyaan variabel X dan Y dinyatakan valid yang berjumlah 49 soal pertanyaan.. Peneliti memilih untuk menggunakan butir soal yang valid, dengan semua variabel komitmen organisasi (X1), kualitas SDM (X2), komitmen organisasi (X3), pencatatan administrasi (X4), peraturan/regulasi keuangan daerah (X5), perubahan anggaran (X6) dan serapan anggaran (Y) berjumlah 49 butir soal.

### Uji Reabilitas

uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran, dan bisa mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat pemantapan dan ketepatannya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Adapun rekapitulasi hasil uji coba reliabilitas terhadap variabel X dan variabel Y dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

**Tabel 4.**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Reabilitas**

No.	Variabel	Koefisien Reabilitas	Keterangan
1.	Perencanaan Anggaran (X1)	0.919	Sangat tinggi
2.	Kualitas SDM (X2)	0.920	Sangat tinggi
3.	Komitmen Organisasi (X3)	0.897	Tinggi
4.	Pencatatan Administrasi (X4)	0.890	Tinggi
5.	Peraturan/Regulasi Keuangan Daerah (X5)	0.903	Tinggi
6.	Perubahan Anggaran (X6)	0.752	Tinggi
7.	Serapan Anggaran (Y)	0.862	Tinggi

Sumber : Data olahan SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai alpha untuk variabel perencanaan anggaran (X1), Kualitas SDM (X2), Komitmen Organisasi (X3), Pencatatan Administrasi (X4), peraturan/regulasi keuangan daerah (X5), perubahan anggaran (X6) dan serapan anggaran (Y) dinyatakan reliabel.

### Uji Hipotesis

#### 1. Regresi Linear Berganda

**Tabel 5.**  
**Hasil Perhitungan Uji Hipotesis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,146	,959	8,491	,000

X1	-,002	,045	-,003	-,035	,972
X2	,278	,044	,508	6,268	,000
X3	-,098	,048	-,183	-2,052	,045
X4	,133	,065	,208	2,037	,046
X5	,000	,069	,000	-,004	,997
X6	,551	,066	,513	8,328	,000

a. Dependent Variable: Y

Persamaan regresi yang diperoleh

$$Y = 8.146 - 0,002 X1 + 0.278 X2 - 0.98 X3 + 0.133 X4 + 0.000 X5 + 0.551 X6 + e$$

Analisis persamaan regresi :

- Nilai konstanta yang didapat sebesar 8.146, maka memiliki arti bahwa apabila variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, komitmen organisasi, pencatatan administrasi, peraturan/regulasi keuangan daerah, perubahan anggaran nilai konstantanya diasumsikan bernilai 0 maka nilai serapan anggaran adalah 8.146
- Nilai koefisien regresi variabel perencanaan anggaran bernilai negatif sebesar 0.002 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel perencanaan anggaran akan menyebabkan penurunan pada serapan anggaran sebesar 0,002
- Nilai koefisien regresi variabel kualitas SDM bernilai positif sebesar 0.278 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel kualitas SDM akan menyebabkan kenaikan pada serapan anggaran sebesar 0.278
- Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi bernilai negatif sebesar 0.098 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel komitmen organisasi akan menyebabkan penurunan pada serapan anggaran sebesar 0.098
- Nilai koefisien regresi variabel pencatatan organisasi bernilai positif sebesar 0.133 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel pencatatan administrasi akan menyebabkan kenaikan pada serapan anggaran sebesar 0.133
- Nilai koefisien regresi variabel peraturan/regulasi keuangan daerah bernilai negatif sebesar 0.000 maka memiliki arti bahwa peraturan/regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran
- Nilai koefisien regresi variabel perubahan anggaran bernilai positif sebesar 0,551 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel perubahan anggaran akan menyebabkan kenaikan pada serapan anggaran sebesar 0.551

## 2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji t**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Beta	t	Sig.	
		Unstandardized Coefficients					Standardized
		B	Std. Error				Coefficients
1	(Constant)	8,146	,959		8,491	,000	
	X1	-,002	,045	-,003	-,035	,972	
	X2	,278	,044	,508	6,268	,000	
	X3	-,098	,048	-,183	-2,052	,045	
	X4	,133	,065	,208	2,037	,046	
	X5	,000	,069	,000	-,004	,997	
	X6	,551	,066	,513	8,328	,000	

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data olahan SPSS versi 26, 2023

Keterangan :

- Pada variabel X1, diperoleh hasil signifikansi sebesar  $0.972 > 0.05$ , H1 ditolak yang artinya perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran
- Pada variabel X2, diperoleh hasil signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  H1 diterima yang artinya kualitas SDM berpengaruh terhadap serapan anggaran
- Pada variabel X3, diperoleh hasil signifikansi sebesar  $0.045 < 0.05$  H1 diterima yang artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan anggaran
- Pada variabel X4, diperoleh hasil signifikansi sebesar  $0.046 < 0.05$  H1 diterima yang artinya pencatatan administrasi berpengaruh terhadap serapan anggaran
- Pada variabel X5, diperoleh hasil signifikansi  $0.997 > 0.05$  H1 ditolak yang artinya peraturan/regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran
- Pada variabel X6, diperoleh hasil H1 diterima yang artinya perubahan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7**  
**Hasil Uji  $R^2$**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,960 <sup>a</sup>	,921	,913	,872

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X4, X3, X5

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, didapatkan nilai R square sebesar 0,921 yang berarti bahwa pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen sebesar 92.1%. Dapat diartikan bahwa variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, komitmen organisasi, pencatatan administrasi, peraturan/regulasi keuangan daerah dan perubahan anggaran berpengaruh sebesar 92.1% terhadap serapan anggaran. Sedangkan sisanya 7.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

#### **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran**

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa H1 ditolak yang artinya perencanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik tidak dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanja di OPD Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada OPD yang berkaitan dengan perencanaan maupun penentuan anggaran yang timbul didalam perencanaan, dimana terdapat suatu pendapat bahwa usulan anggaran yang tidak semuanya akan disetujui yang menjadikan perencanaan anggaran tersebut tidak mempengaruhi penyerapan anggaran belanja. Faktor penyebabnya dapat berasal dari usulan anggaran yang lebih besar dibanding biaya yang dibutuhkan tanpa lebih dulu memikirkan kebutuhan riil nya di lapangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of reasoned action*, bahwa perilaku dapat berubah berdasarkan dengan niat pelaku yang menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Apabila seseorang mempunyai keyakinan terhadap tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, maka adanya pemahaman tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku kerjanya. Adanya konsep dalam perencanaan penggunaan anggaran yang secara nyata tentu akan mengarahkan penggunaan anggaran secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Maka semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, tentunya akan memudahkan proses pelaksanaan atau pun realisasi pada tahun anggaran yang sedang berjalan sehingga akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [15], [17] dan [28] yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan

anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan [13] dan [14] yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Kualitas SDM terhadap Serapan Anggaran**

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H1 diterima, artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Faktor utama keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah pegawai yang berpengalaman, terlatih, mampu menangani tugasnya dengan tepat, bertanggungjawab dan mempunyai motivasi. Adanya ketidaktepatan dalam penetapan SDM akan mempengaruhi pengelolaan dan penyerapan anggaran yang tidak baik karena ketidakmampuan SDM sehingga berdampak pada kualitas pelayanan ke publik menjadi kurang optimal. Hasil ini didukung penelitian [13], [14] dan [17] yang menunjukkan bahwa SDM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara, dan prosedur teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of reasoned action* bahwa pemerintah mempunyai peranan sebagai sumber daya manusia yang harapannya sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan kemampuannya sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintahan dapat tercapai sejalan dengan apa yang telah direncanakan. Semakin baik kualitas sumber daya manusia di dalam suatu OPD yang sudah paham akan tugas dan wewenang atas fungsi jabatan masing-masing maka penyerapan anggaran juga akan semakin meningkat.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Serapan Anggaran**

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan anggaran, sehingga H1 pada penelitian ini diterima. Komitmen organisasi merupakan bentuk sikap keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, memiliki usaha yang keras sesuai keinginan organisasi tertentu, dan memiliki keyakinan tertentu serta penerimaan nilai atas tujuan organisasi. Jadi, keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemeliharaan seorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemeliharaan pada organisasi yang mempekerjakan kepatuhan dalam pelaksanaan realisasi anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian [13] dan [17].

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of reasoned action*, bahwa pegawai yang didukung dengan keyakinan serta komitmen yang tinggi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Komitmen yang tinggi tersebut tentunya akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan berimplikasi terhadap pencapaian penyerapan anggaran belanja. Menurut [23]), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Namun sebaliknya, hasil penelitian ini berpengaruh negative, dalam arti semakin kuat komitmen organisasi maka kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam penyerapan anggaran. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi, maka suatu organisasi akan semakin cermat dan teliti dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berakibat dengan menurunnya dilai serapan anggaran.

### **Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Serapan Anggaran**

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H1 diterima, artinya bahwa pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sesuai dengan *theory stakeholder*, pencatatan administrasi merupakan bagian dari Kumpulan kebijakan yang berpengaruh dalam urusan pemerintahan. Peranan fungsi administrasi dalam penyerapan anggaran sangat penting dimulai dari proses penyusunan perencanaan sampai dengan implementasi penyerapan anggaran. Penetapan panitia pengadaan merupakan awal dalam proses administrasi untuk menyerap anggaran, jika penetapan panitia pengadaan terhambat maka seluruh rangkaian kegiatan akan mengalami keterlambatan [13] Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [14] juga memberikan hasil bahwa pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Peraturan/Regulasi Keuangan Daerah terhadap Serapan Anggaran**

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa regulasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penyebab ketidaksignifikanan pengujian ini karena regulasi yang turun tidak dalam bentuk SOP, serta keterlambatan juknis dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [29] dan [15] bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dikarenakan satker terlalu berhati-hati atau terkesan takut untuk mengeksekusi program dan kegiatan walaupun regulasi telah jelas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [16] dan [18] bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

### **Pengaruh Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran**

Perubahan Anggaran memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memiliki nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di tiap OPD di Kabupaten Sidoarjo. Dimana perubahan anggaran yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menyesuaikan anggaran yang dibelanjakan untuk membuat perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Penyesuaian atas penerimaan dilakukan agar dana yang ada dapat dioptimalkan penggunaannya. Perubahan anggaran ini tentunya akan memengaruhi penyerapan anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan anggaran dalam rencana keuangan awal dapat meminimalisir terjadinya anggaran sisa dalam satu periode yang akan mempengaruhi penyerapan anggaran tersebut. Hasil ini diperkuat dengan hasil penelitian [18] dan [22] yang menunjukkan hasil bahwa perubahan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran di suatu OPD.

## **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Faktor tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi dan perubahan anggaran, sedangkan 2 faktor lainnya yaitu perencanaan dan peraturan/regulasi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan anggaran di OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini memberikan implikasi penting bagi semua OPD untuk menekankan perhatian pada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada OPD di Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil langkah strategis dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan peraturannya

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta kesehatan sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua, suami, anak,

## **REFERENSI**

- [1] N. Bloom and J. Van Reenen, “*濟無*No Title No Title No Title,” *NBER Work. Pap.*, vol. 5, p. 89, 2013, [Online]. Available: <http://www.nber.org/papers/w16019>
- [2] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017, “Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga,” pp. 1–43, 2017, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/214~PMK.02~2017Per.pdf>
- [3] W. Widhianto, F. Hukum, P. M. Hukum, and K. K. Negara, “GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN,” 2011.
- [4] C. Id, “Serapan Anggaran 2021 Kabupaten Sidoarjo Masih Mencapai 62 Persen, Apa Dampaknya?,” *Celah.id*, Sidoarjo, Dec. 2021. [Online]. Available: <https://celah.id/news/2021/12/01/serapan-anggaran-2021-kabupaten-sidoarjo-masih-mencapai-62-persen-apa-dampaknya/>
- [5] Radarsidoarjo.jawapos.com, “Penyerapan Anggaran Baru 55 persen, Dewan Minta Pemkab Sidoarjo Ngebut,” *Kota Delta*, Sidoarjo, Sep. 2022.
- [6] Radarsidoarjo.jawapos.com, “serapan-dan-realisis-anggaran-pemkab-sidoarjo-masih-di-bawah-25-persen,” *Kota Delta*, Sidoarjo, May 2023. [Online]. Available: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85937187/serapan-dan-realisis-anggaran-pemkab-sidoarjo-masih-di-bawah-25-persen>
- [7] N. Hadi, *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- [8] D. Valle-Cruz, V. Fernandez-Cortez, and J. R. Gil-Garcia, “From E-budgeting to smart budgeting: Exploring the potential of artificial intelligence in government decision-making for resource allocation,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 2, p. 101644, 2022.
- [9] A. Junita, E. Abubakar, and S. Abdullah, “The effect of budget variances on the local government budget changes with legislature size as moderator,” *Acad. J. Econ. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 162–173, 2018.
- [10] R. A. Sarwendhi, “The effect of participatory budgeting, information asymmetry, and organizational commitment on budgetary slack,” *Indones. Account. Rev.*, vol. 11, no. 2, pp. 209–219, 2021.

- [11] M. Mahdalena, H. Haliah, S. Syarifuddin, and D. Said, "Budget Accountability in The Perspective of Habermas Communicative Action Theory," *Golden Ratio Soc. Sci. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 61–72, 2021.
- [12] G. Pagalung and R. A. Damayanti, "Effect of the contents of information on the accountability of the implementation of the regional revenue and expenditure budget against the re-election of incumbents," in *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)*, Atlantis Press, 2019, pp. 575–585.
- [13] K. Kennedy, N. Azlina, J. Julita, and S. Nurulita, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis," *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 13, no. Vol.13 No. 2 (2020), pp. 108–117, 2020, doi: 10.35143/jakb.v13i2.3652.
- [14] M. Syahwildan and I. Damayanti, "Analisis faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi," *Ikraith-Ekonomika*, vol. 5, no. 1, pp. 169–176, 2022.
- [15] R. S. Rahmawati and J. F. Ishak, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi," *Indones. Account. Res. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 180–189, 2020.
- [16] J. Akuntansi and P. Syariah, "Jamasy : Jamasy :," vol. 3, pp. 109–125, 2023.
- [17] N. Laila Yuliani and L. Lestari, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja," *Bus. Econ. Conf. Util. Mod. Technol.*, vol. 3, pp. 648–663, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id>
- [18] H. Setiawan, "Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing ...," *J. Akunt. Malikussaleh*, vol. 1, no. 3, pp. 425–445, 2023, [Online]. Available: <https://ojs.unimal.ac.id/jam/article/view/9874%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/jam/article/download/9874/4530>
- [19] Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In Metodologi Penelitian.)," in *Metodologi Penelitian*, 2017.
- [20] M. Sarstedt, C. M. Ringle, J. H. Cheah, H. Ting, O. I. Moisescu, and L. Radomir, "Structural model robustness checks in PLS-SEM," *Tour. Econ.*, 2020, doi: 10.1177/1354816618823921.
- [21] S. dan Wiratma, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta, 2015.
- [22] F. Amalia, S. Hartati, R. Wahyudi, and P. N. Sriwijaya, "Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan," *Jakt*, vol. 1, no. 2, pp. 131–146, 2022.
- [23] C. T. Putri, *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU*. Bengkulu, 2014.
- [24] dan M. Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, *Statistika Terapan untuk Penelitian Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- [25] E. T. 2005 Ruseffendi, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non Eksakta lainnya*. Bandung: Tarsito Bandung, 2005.
- [26] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- [27] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2017.
- [28] "NASPUB YOGA 2 (ACC) (1).pdf."
- [29] A. Rifai, B. A. Inapty, and R. S. Pancawati M., "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB)," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, pp. 1–10, 2016, doi: 10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.